

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2022)**

Program Studi S1 Akuntansi



Disusun Oleh :

Silvia Maharani

NIM : 31402000140

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

SEMARANG

2024

Halaman Pengesahan Skripsi

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2022)

Disusun Oleh:

Silvia Maharani

NIM 31402000140

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 26 Januari 2024

Menyetujui:



Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA.

NIK. 211496006

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**(Studi Pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2022)**

Disusun Oleh :

Silvy Maharani

NIM. 31402000140

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 01 Februari 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji 1

Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Ak., C.A., CRP
NIK. 211496006

Dr. Sri Anik, S.E., M.Si
NIK. 210493033

Penguji 2

5 Feb 2024

Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., C.R.P
NIK. 211492003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi pada tanggal 01 Februari 2024



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP
NIK. 211403012

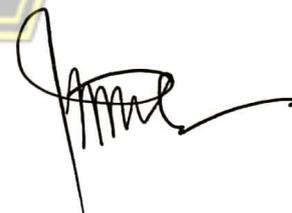
HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Silvy Maharani
NIM : 31402000140
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas dan *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance*” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 05 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Silvy Maharani

31402000140

INTISARI

Pajak adalah iuran wajib oleh badan atau perseorangan yang harus dan wajib dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa dan terikat yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bagi pemerintah dan bagi perusahaan merupakan hal yang berbeda. Bagi perusahaan yang memiliki pendapatan/laba besar maka besar pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan operasional perusahaan kecil maka pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga semakin kecil. Namun, bagi perusahaan pembayaran pajak adalah sebuah beban untuk dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teori agensi. Teori keagenan atau teori agensi dipilih sebagai dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemberi wewenang (*principal*) dengan yang diberi wewenang (*agent*) yang saling bekerja sama untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingan tiap-tiap individu, oleh karena itu dapat memicu terjadi adanya konflik kepentingan. *Principal* menginginkan agar manajemen perusahaan menjalankan kewajibannya untuk dapat mensejahterakan pemegang saham dengan

pembagian deviden atau kenaikan harga saham. Sedangkan *agent* yang seharusnya bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan *principal* lebih fokus pada meningkatkan kesejahteraan pribadinya sendiri melalui peningkatan kompensasi

Penelitian ini mempunyai enam hipotesis yaitu tata Kelola perusahaan yang diukur menggunakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, tata Kelola perusahaan yang diukur menggunakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan *annual report* dari perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 dan 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Penelitian ini menggunakan uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan variabel tata kelola perusahaan yang diukur

menggunakan proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data penelitian berupa data sekunder melalui *annual report*. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021 dan 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Berdasarkan hasil Teknik tersebut didapatkan data sebesar 60 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi *software* SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan variabel tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, *Capital intensity*, *Tax avoidance*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan pra skripsi yang berjudul “PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*” (Studi Pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2022)

Penyusunan pra skripsi ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program S1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses penyusunan pra skripsi ini, penulis menyadari bahwa selesainya pra skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, petunjuk serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

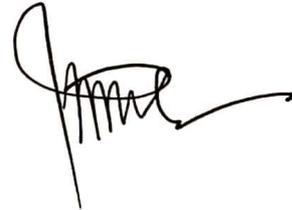
1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dedi Rusdi, S.E.,M.Si.,Akt.,CA. selaku Dosen Pembimbing Pra Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan pra skripsi ini hingga selesai.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan sebagai pedoman dalam penulisan pra skripsi.
5. Seluruh staff, karyawan TU, petugas administrasi dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomiyang senantiasa membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
6. Orang tua penulis, bapak Kasam dan ibu Nuraemi serta kakak penulis Isna serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk keberhasilan penulis.
7. Teman terbaik penulis Ocil, Yiko, Nimoy, Farah, Ayiz dan Ihya yang sudah senantiasa memberikan dukungan dan doa serta selalu ada dikala susah maupun senang.
8. Taqi, penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih karena selalu memberikan *support* dan meluangkan waktu membantu saya dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
9. *Last But No Least* yaitu diri saya sendiri yang sudah berjuang dan tak kenal lelah serta selalu berusaha untuk keberhasilan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan pra skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan pra skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 25 Oktober 2023

Penulis



Silvy Maharani



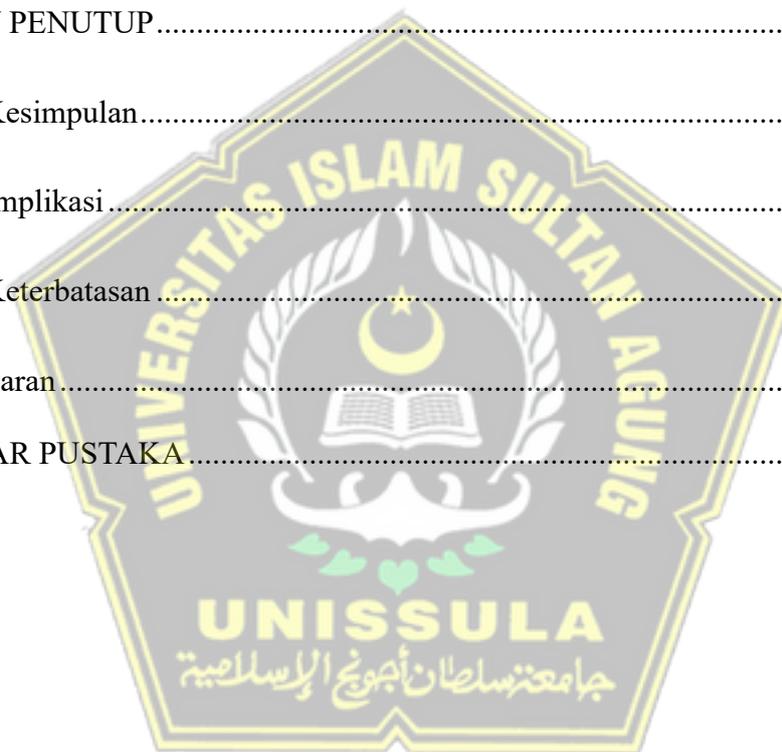
DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Skripsi	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
INTISARI.....	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Pertanyaan Penelitian	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Grand Theory.....	14
2.1.1 Teori Agensi	14
2.2 Variabel Penelitian.....	15
2.2.1 Tax avoidance	15

2.2.2 Tata Kelola Perusahaan.....	16
2.2.3 Profitabilitas.....	20
2.2.4 Capital intensity	21
2.3 Penelitian Terdahulu	22
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis & Pengembangan Hipotesis	26
2.4.1 Pengembangan Hipotesis.....	26
2.5 Kerangka Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Populasi dan Sampel.....	35
3.3 Sumber dan Jenis Data	36
3.4 Metode Pengumpulan Data	37
3.5 Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel	37
3.5.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	38
3.6 Teknis Analisis.....	42
3.6.1 Analisis Deskriptif	42
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.7 Model Regresi Berganda	46
3.7.1. Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
3.8 Uji Goodness Of Fit.....	47
3.8.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	47

3.8.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	47
3.8.3 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
4.2 Analisis Deskripsi Uji Variabel Penelitian	50
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	54
4.3.1 Hasil Uji Normalitas	54
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	56
4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi	57
4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	58
4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	60
4.5 Hasil Uji Goodness Of Fit.....	63
4.5.1 Hasil Signifikansi Simultan (Uji F)	63
4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	64
4.6 Hasil Uji Pengujian Hipotesis	65
4.6.1 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	65
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
4.7.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Komite Audit terhadap Tax avoidance.....	67
4.7.2 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Kualitas Audit terhadap Tax avoidance.....	69

4.7.3 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax avoidance	70
4.7.4 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Tax avoidance	72
4.7.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax avoidance.....	73
4.7.6 Pengaruh Capital intensity terhadap Tax avoidance	75
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Implikasi.....	79
5.3 Keterbatasan	80
5.4 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2021 – 2022	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	38
Tabel 4.1 Perincian Sampel.....	49
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Simultan.....	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi t	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib oleh badan atau perseorangan yang harus dan wajib dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa dan terikat yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting terhadap setiap negara karena pajak dapat digunakan pemerintah untuk melaksanakan program-program kesejahteraan rakyat. Pajak bagi pemerintah dan bagi perusahaan memiliki perbedaan. Bagi perusahaan yang memiliki pendapatan/laba tinggi maka besar pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan operasional perusahaan kecil maka pajak yang dibayarkan perusahaan juga kecil. Namun, bagi perusahaan pembayaran pajak adalah sebuah beban untuk dilakukan.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2021 – 2022 (Dalam Milliar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2021	%	2022	%
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,1	75,2	1.924.937,5	81,9
Penerimaan Bukan Pajak	510.930,6	24,8	426.259,1	18,1
Total	2.058.771	100	2.351.197	100

sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 membuktikan bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya sangat dominan dibandingkan penerimaan bukan pajak. Hal ini semakin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia (khususnya Direktorat Jenderal Pajak) perlu meningkatkan langkah untuk mengupayakan penerimaan pajaknya demi terwujudnya percepatan pembangunan nasional. Entitas bisnis merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar akan tetapi tujuan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal seringkali bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berasumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan. Dimana fiskus sebagai principal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang besar, akan tetapi perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pajak juga tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajak, sehingga timbul keinginan

wajib pajak mengefisiensikan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan labanya (Imanto, 2019). Oleh karena itu banyak perusahaan di Indonesia yang berusaha melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan perusahaan mereka (Fiska, 2020)

Pada kenyataannya menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani penerimaan pajak global berpotensi hilang sekitar Rp 3.360 triliun per tahunnya melalui praktik pemindahan keuntungan antar negara (*base erosion and profit shifting*) yang diakibatkan oleh penghindaran pajak (2021) dilansir oleh www.cnnindonesia.com. Kemudian pada laporan Tax Justice Network yang dilansir dari www.pajaku.com menyebutkan Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat). Kerugian tersebut karena wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Menurut laporan The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19 disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan dan orang pribadi terdapat di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan salah satu langkah yang dilakukan wajib pajak badan dalam hal ini adalah perusahaan untuk menghindari pajak namun dengan cara yang legal (Putri & Lawita, 2020). Menurut

(Pohan,2016) dalam (Nugraha & Mulyani, 2019) *Tax avoidance* dikatakan tidak melanggar peraturan perpajakan karena wajib pajak melakukannya dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam peraturan. Menurut Menurut Ayuningtyas dan Sujana (2018) pada (Dewi & Oktaviani, 2021) *tax avoidance* adalah cara untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan secara legal dan tidak menimbulkan bahaya bagi wajib pajak, akan tetapi hal ini dapat menjadi risiko perusahaan yang menimbulkan sanksi, denda, dan citra perusahaan yang memburuk di mata masyarakat. Walaupun *tax avoidance* adalah tindakan legal tetapi tidak disarankan oleh pemerintah.

Perusahaan pasti memiliki kepentingan yang berbeda mengenai keterlibatan mereka dalam tindakan *tax avoidance*. Tindakan ini berisiko memberikan dampak yang kurang baik bagi perusahaan. Hal tersebut karena tindakan *tax avoidance* dapat merusak nama baik perusahaan dan berpotensi mendapatkan hukuman. Kemudian, *tax avoidance* membuktikan adanya penyampaian informasi yang tidak sesuai kepada investor yang menimbulkan adanya perbedaan informasi dan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Hal ini merupakan tindakan manajer yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi (Safitri & Muid, 2020)

Tingginya kesempatan perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan (Corporate governance) yang baik sangat dibutuhkan. Tata kelola (Corporate governance) adalah sebuah sistem

pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Tata kelola perusahaan (Corporate governance) juga mengharuskan bagaimana perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan sehingga kinerja dapat dipantau, dilakukan dan dipertanggung jawabkan. Tata kelola perusahaan (Corporate governance) memastikan agar perencanaan yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi beban perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal (Putri & Lawita, 2020). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris Independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan Capital intensity.

Faktor yang pertama adalah komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu mengerjakan fungsi dan tugas dewan komisaris. Komite audit membantu dewan komisaris dalam melakukan tugas pengawasan kepada direksi. Apabila komite audit berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, maka kualitas pengawasan dewan komisaris akan lebih baik sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan keagenan dalam perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020) komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya Komite audit yang bertugas memantau laporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan, memiliki masukan tentang manajemen pajak dan teknik penghindaran pajak untuk memberikan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan mematuhi kebijakan

keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fiska, 2020) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya kerja komite audit kurang memuaskan dan tidak mempengaruhi keputusan yang diambil perusahaan, yang menunjukkan kurangnya upaya perusahaan untuk menghindari pajak, meskipun komite audit memenuhi standar Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah hal utama yang digunakan dalam laporan keuangan untuk menggambarkan tingkat independensi dan keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor (Syaivina Ika Listiyadi, 2022). Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan ukuran proksi untuk kantor akuntan publik (KAP). Jika kualitas audit baik dapat membantu menyelesaikan masalah keagenan manajemen, pemegang saham, serta masalah keputusan *tax avoidance* (Oliviana & Muid, 2019). Hal tersebut juga ditegaskan oleh penelitian yang dilakukan (Fiska, 2020) kualitas audit yang transparan menjelaskan adanya pengungkapan yang akurat. Menurut (Syaivina Ika Listiyadi, 2022) hal penting dalam proses audit yang dilaksanakan perusahaan adalah tingginya keharusan akan transparansi keuangan perusahaan. Jika, laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The Big Four dirasa memiliki kualitas yang tinggi dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP non- The Big Four. Penelitian yang dilakukan oleh (Novilim, 2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga membuktikan bahwa status Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki peran dalam tindakan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fiska, 2020) menjelaskan bahwa

kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang mana memberikan bukti bahwa status KAP big four tidak memiliki peran terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Selanjutnya proporsi dewan komisaris Independen. Menurut (Fiska, 2020) dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan atau tidak terafiliasi dengan anggota direksi di perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya serta pemegang saham mayoritas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Lawita, 2020) proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan dengan cukup baik kepada manajemen perusahaan. Tingginya pengetahuan dewan komisaris terhadap latar belakang bisnis perusahaan akan mempengaruhi kinerja pengawasan komisaris dan mengakibatkan efektifnya perumusan strategi perusahaan termasuk dalam strategi yang berkaitan dengan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fiska, 2020) hasil dari penelitian yang dilakukannya adalah proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* karena tidak semua anggota dewan komisaris independen menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan kurang berjalan dengan baik.

Selanjutnya adalah struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki dari pemilik perusahaan dan kepemilikan perusahaan non-bank seperti asuransi, investasi dan lain – lain (Putri & Lawita, 2020). Menurut (Anggraini & Destriana, 2022)

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya pada akhir tahun. Tingginya tingkat kepemilikan institusional mengakibatkan semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga dapat mengurangi konflik antar kepentingan dan begitupun sebaliknya. Pendapat itu sama dengan penelitian yang telah diteliti oleh (Fiska, 2020) bahwa dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih baik, yang tentunya akan menjamin kepentingan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak artinya bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau dan mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal karena kepemilikan institusional dianggap mampu memonitori setiap keputusan yang akan diambil oleh manajer perusahaan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rombebunga, 2019) mengatakan tidak ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang patuh terhadap pembayaran pajak tidak menimbang besarnya kepemilikan saham institusional, tetapi cenderung memperhatikan besarnya pajak yang dibayarkan dari pada melakukan praktik penghindaran pajak yang bisa merusak nama baik perusahaan. Artinya, citra perusahaan lebih penting dari pada melakukan penghindaran pajak dalam rangka meningkatkan laba perusahaan, sehingga penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.

Faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang selanjutnya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang menggambarkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan laba yang tinggi dianggap sebagai perusahaan yang berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan pastinya sesuai dengan harapan pemilik perusahaan dan para stakeholder-nya (Safitri & Muid, 2020). Di dalam profitabilitas terdapat beberapa rasio, salah satunya adalah Return On Assets (ROA). Penelitian ini menggunakan Return On Assets (ROA) untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020) Return On Assets (ROA) menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Bandaro & Ariyanto, 2020) mengatakan bahwa Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi ROA menunjukkan pengelolaan aset yang efektif untuk menghasilkan laba yang optimal. Hal ini juga menunjukkan efisiensi operasional perusahaan, dalam mengelola beban pajaknya yang akan cenderung rendah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Fiska, 2020) mengatakan bahwa Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya adalah Capital intensity. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Malik et al., 2022) Capital intensity adalah komponen yang memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan, yang mana perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan memanfaatkan

penyusutan aset tetap perusahaan yang akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan. Kemudian menurut (Izzati & Riharjo, 2022) Capital intensity merupakan intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan membandingkan antara total aset tetap dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Malik et al., 2022) disimpulkan bahwa Capital intensity berpengaruh positif karena semakin besar Capital intensity pada perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar aset tetap suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula penyusutan dan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Oktaviani, 2021) menyatakan hal sebaliknya bahwa Capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat kontradiksi diantara hasil-hasil penelitian tersebut, sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Fiska, 2020) yang menghubungkan variabel tata kelola perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Pembaharuan pada penelitian ini adalah variabel baru yaitu capital intensity. Alasan penambahan variabel capital intensity yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini angka koefisien determinasi dari variabel tata kelola perusahaan dan profitabilitas sebesar 14,7% artinya masih ada 85,3% dijelaskan oleh faktor – faktor lain. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Novilim, 2020) menunjukkan angka koefisien

determinasi dari variabel kualitas audit, kompensasi rugi fiskal, intensitas modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, serta leverage sebesar 61,3% artinya variabel ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Selain penambahan variabel kebaruan, penelitian ini juga memiliki perbedaan pada periode pengamatan yaitu perusahaan property & real estate yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena dan yang terjadi, yaitu banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, Fenomena tentang penghindaran pajak telah banyak diteliti sebelumnya akan tetapi memperoleh hasil yang kontradiksi, sehingga penelitian ini kembali menguji pengaruh komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris Independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *Capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*?
2. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*?
3. Bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*?

4. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*?
6. Bagaimana pengaruh *Capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dari rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris Independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *Capital intensity* terhadap *tax avoidance*

1. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*
3. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*
4. Untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*
5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*
6. Untuk menganalisis pengaruh *Capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi para peneliti untuk melakukan berbagai riset terkait pengaruh komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris Independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *Capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan memahami bagaimana komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris Independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *Capital intensity* terhadap *tax avoidance* berdampak pada tingkat penghindaran pajak serta membantu perusahaan dalam mengelola reputasi dan tanggung jawab sosial mereka terkait praktik perpajakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Agensi

Teori Teori keagenan atau teori agensi adalah dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemberi kuasa (principal) dan orang yang diberi kuasa (agent) yang memiliki kerja sama untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Teori keagenan memiliki asumsi setiap individu memiliki motivasi dari kepentingannya sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan konflik perbedaan kepentingan. Pemberi kuasa menginginkan agar manajemen perusahaan bertanggungjawab untuk dapat memberikan kesejahteraan terhadap pemegang saham dengan pembagian deviden/kenaikan harga saham. Sedangkan agent yang seharusnya bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan pihak yang diberi kuasa lebih fokus pada meningkatkan kesejahteraan pribadinya dengan peningkatan kompensasi (Izzati & Riharjo, 2022). Pada hal ini pemerintah bertindak sebagai principal dan wajib pajak badan sebagai agen yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Dalam agency theory juga dapat diasumsikan bahwa individu akan bertindak dan berbuat untuk mensejahterakan dirinya. Manajer yang bertindak sebagai agen melakukan tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik ini dilakukan manajer dengan cara memaksimalkan laba perusahaan sehingga mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya tindakan oportunistik yang dilakukan manajer, bisa mengarahkan pada praktik penghindaran pajak (Widodo,

2021). Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa pihak manajemen juga dapat dikaitkan dengan praktek tax avoidance yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Maksudnya, pihak manajemen melakukan hal tersebut guna mengimbangi keinginan pemilik yaitu berupa mendapatkan laba maksimal. Perusahaan semaksimal mungkin memaksimalkan laba perusahaan. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar kinerja manajemen terlihat meningkat dari tahun ke tahun sehingga dapat berhasil mencapai target yang diinginkan (Nugraha & Mulyani, 2019).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Tax avoidance

Penghindaran pajak erat kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan. Tax avoidance adalah upaya wajib pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan. Menurut (Setyani, 2008:12) dalam (Izzati & Riharjo, 2022) Penghindaran pajak mengacu pada upaya perencanaan pajak dimana perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan atau memastikan total biaya pajaknya dapat diminimalkan. Ketentuan ini tidak diatur didalam perundang-undangan perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Jusman & Nosita, 2020) Tax avoidance ialah tindakan yang dilakukan dengan tujuan mengurangi pajak (penghindaran pajak). Penghindaran pajak (tax avoidance) memiliki definisi sebagai perbuatan yang dilakukan WP dengan tujuan menekan beban pajaknya secara legal. Pada penelitian ini tax avoidance atau penghindaran pajak diukur dengan menggunakan rasio CETR atau Cash Effective Tax Rate. Rasio ini diukur

dengan membagi antara pembayaran pajak penghasilan dengan cash dibagi dengan laba sebelum pajak. Berikut ini adalah rumus dari CETR atau Cash Effective Ratio.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2.2 Tata Kelola Perusahaan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Lawita, 2020) corporate governance adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Corporate governance juga mengharuskan bagaimana perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan sehingga kinerja dapat dipantau, dilakukan dan dipertanggung jawabkan. Melalui adanya penerapan tata kelola perusahaan didalam perusahaan mampu menjadi batas bagi kepentingan pribadi agar tidak mementingkan kepentingan pribadi dan diharapkan dapat mengatasi masalah agensi terhadap penghindaran pajak (Fiska, 2020) Pada penelitian ini, tata faktor kelola perusahaan yang diteliti adalah komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional.

2.2.2.1 Komite Audit

Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang anggotanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang mempunyai tugas untuk membantu pemeriksaan terhadap fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Fiska, 2020). Definisi komite audit menurut (Oliviana & Muid, 2019) Komite audit dibentuk oleh dewan direksi.

Perwakilan independent merupakan ketua dari komite audit. Anggota komite audit terdiri dari perwakilan eksternal dan/atau staf yang handal. Struktur komite audit berdasarkan pasal 4 yaitu mempunyai anggota paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) membahas tentang tugas pokok dari komite audit yaitu komite audit pada prinsipnya membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review pada sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas komite audit juga berhubungan dengan pengamatan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu jumlah dari komite audit pada perusahaan property & real estate yang terdapat di BEI dan memiliki laporan tahunan (Annual Report) dari tahun 2021 – 2022 secara berurutan.

$$KOA = \Sigma \text{Komite Audit}$$

2.2.2.2 Kualitas Audit

(Satori, 2010) dalam (Fiska, 2020) mengatakan di dalam perpajakan transparansi terhadap pemegang saham semakin diutamakan oleh otoritas publik, yang dapat didapat dengan cara melaporkan hal-hal terkait perpajakan di pasar modal dan pertemuan pemegang saham. Definisi kualitas audit menurut (Syaiivina Ika Listiyadi, 2022) Kualitas audit merupakan indikator utama dalam laporan keuangan untuk menjelaskan persepsi tingkat independensi dan keahlian yang dimiliki auditor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Jusman & Nosita, 2020)

aktivitas pengauditan ialah pencerminan penerapan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip penerapan tata kelola perusahaan. Kualitas audit yang baik dapat menyelesaikan masalah keagenan manajemen dan pemegang saham, termasuk dalam masalah keputusan tax avoidance. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah hal yang harus dilihat untuk mengukur kualitas audit. Terdapat dua ukuran KAP yaitu KAP The Big Four dan KAP non The Big Four. Maka dari itu indikator untuk penelitian ini menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang diaudit oleh KAP big four bernilai 1, apabila tidak maka bernilai 0 sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Rombebunga, 2019).

2.2.2.3 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan atau tidak terafiliasi dengan anggota direksi di perusahaan (Fiska, 2020). Menurut UU RI No. 40 tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007 Komisaris independen merupakan organ perseroan yang melakukan pengawasan umum dan khusus kepada dewan. Menurut (Oliviana & Muid, 2019) Dalam hierarki kepengurusan, anggota komite mempunyai prioritas setelah pemegang saham. Tindakan perusahaan memutuskan tujuan mereka, melakukan pengembangan tentang kebijakan yang komprehensif, dan memilih orang untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan yang ada, yang mana ini merupakan tanggung jawab oleh komisaris independen. Dewan memainkan peran sentral dalam tata kelola perusahaan. Menurut (Putri & Lawita, 2020) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam suatu perusahaan, keberadaan dewan komisaris independen sangat diperlukan. Hal tersebut juga sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Fiska, 2020) bahwa komisaris independen berperan sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh pihak manajemen akan menurun, sehingga jumlah dewan komisaris independen yang meningkat dapat menekan adanya tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dijabarkan fungsi dan tugas dewan komisaris sebagai berikut: (1) melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur (2) dalam melakukan untuk tugas, dewan direksi berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT (3) kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 Ayat 3 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menetapkan bahwa perusahaan wajib memiliki paling kurang 30 persen dewan komisaris independen. Untuk mengukur proporsi dewan komisaris independen menggunakan rumus berikut ini

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris independen}}$$

2.2.2.4 Struktur Kepemilikan Institusional

Menurut (Dewi & Jati, 2014) pada (Rombebunga, 2019) mengatakan bahwa Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham selain kepemilikan

individual yang berasal dari luar perusahaan. Perusahaan harus dapat bertanggungjawab kepada pemegang saham. Oleh karena itu, pemilik institusi mempunyai wewenang untuk melihat serta memastikan apakah manajemen mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham atau tidak. (Izzati & Riharjo, 2022). kemudian menurut (Zainuddin dan Anfas, 2021) pada (Dewi & Oktaviani, 2021) Kepemilikan institusional akan mengawasi perilaku manajemen agar bertindak secara efektif dan berhati-hati saat mengambil keputusan. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian ini struktur kepemilikan institusional diukur dengan membagi jumlah saham pihak institusi dengan jumlah saham yang beredar sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Izzati & Riharjo, 2022). Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham pihak institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang menggambarkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan laba yang tinggi dianggap sebagai perusahaan yang berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan pastinya sesuai dengan harapan pemilik perusahaan dan para stakeholder-nya (Safitri & Muid, 2020). Pengukuran profitabilitas diproksikan dengan rumus ROA menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan dalam menggunakan asetnya secara efisien untuk mendapatkan profitnya berperan dalam usaha penghindaran pajak. Profitabilitas menunjukkan kemampuan kinerja perusahaan dalam

menghasilkan laba (Novilim, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020) ROA menjelaskan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri atau modal pinjaman, investor melihat apakah perusahaan dalam mengelola asset telah efektif atau belum. Untuk mengukur profitabilitas pada penelitian ini menggunakan return on asset (ROA) dan rumusnya sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.4 *Capital intensity*

Capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (Malik et al., 2022). Intensitas modal mengacu pada proporsi kegiatan investasi yang dilakukan suatu perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap (*capital intensity*) dan persediaan (*Inventory Intensity*). Rasio intensitas modal dapat mewakili tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut (Dewi & Oktaviani, 2021) *Capital intensity* menunjukkan perbandingan antara aset tetap dengan total aset perusahaan. Selain itu *Capital intensity* akan menggambarkan sebuah perusahaan yang berinvestasi dengan menggunakan aset tetap yang dimiliki untuk memanfaatkan beban penyusutan. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh (Bandaro & Ariyanto, 2020) Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi investasi perusahaan dalam aset tetap semakin besar dibandingkan dengan penggunaan dana untuk aset lancar. Intensitas modal atau intensitas kepemilikan atas aktiva tetap diperkirakan akan mempengaruhi penghindaran pajak akibat

adanya beban penyusutan yang berkaitan dengan aktiva tetap suatu perusahaan. Biaya penyusutan mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga biaya penyusutan yang diakibatkannya mempengaruhi pajak perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajaknya. (Izzati & Riharjo, 2022). Berikut ini adalah rumus dari Capital intensity:

$$CAP = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas dan *Capital intensity* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Fiska, 2020)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: Komite Audit, Struktur Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Profitabilitas Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit & Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Sedangkan Kepemilikan Institusional berpengaruh negative secara signifikan terhadap

				penghindaran pajak
2.	(Bandaro & Ariyanto, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajerial Dan <i>Capital intensity Ratio</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajerial, dan <i>Capital intensity Ratio</i> Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	ROA berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Sedangkan Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajerial & <i>Capital intensity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	(Rombebunga, 2019)	Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak	Variabel Independen: Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Proporsi Komisaris Independen & Kualitas Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak Sedangkan Kepemilikan Institusional & Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4.	(Malik et al., 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan <i>Capital intensity</i>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, <i>Capital intensity</i>	Ukuran Perusahaan & Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

		Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Sedangkan CI berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	(Izzati & Riharjo, 2022)	Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, <i>Capital intensity</i> , Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Independen: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Profitabilitas, Likuiditas, <i>Capital intensity</i> , Dan <i>Inventory Intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Likuiditas, CI & <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Sedangkan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
6.	(Jusman & Nosita, 2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Capital intensity</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Independen: Kualitas Audit, Komite Audit, <i>Capital intensity</i> , dan Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Kualitas Audit, Komite Audit & CI tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Sedangkan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
7.	(Marlinda et al., 2020)	Pengaruh Gcg, Profitabilitas, <i>Capital intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Independen: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Profitabilitas, <i>Capital intensity</i> ,	Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas & CI tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Sedangkana Kepemilikan Institusional,

			Dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Komite Audit & Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
8.	(Nailufaroh et al., 2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajemen, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajemen, dan Intensitas Modal Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	<i>Leverage</i> & Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Sedangkan Kepemilikan Manajemen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
9.	(Novilim, 2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen: intensitas modal, kompensasi rugi fiskal, profitabilitas, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan & <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Sedangkan Kompensasi rugi & Profitabilitas fiskal berpengaruh signifikan <i>negative</i> terhadap penghindaran pajak
10.	(Safitri & Muid, 2020)	Pengaruh Pengungkapan	Variabel Independen:	Pengungkapan CSR &

		<i>Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance</i>	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital intensity</i> Dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Sedangkan <i>Leverage, Capital intensity & Ukuran Perusahaan</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
--	--	--	--	--

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis & Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengembangan Hipotesis

2.4.1.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Diukur Oleh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Salah satu faktor tata kelola perusahaan adalah komite audit. Komite audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sebab komite audit berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan (Pratama & Masripah, 2022). Komite audit bertugas untuk mengontrol proses penyusunan laporan keuangan perusahaan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Berdasarkan teori agensi, komite audit adalah agen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan demikian maka pihak principal sebagai investor atau pemilik perusahaan dapat memperoleh informasi keuangan yang sebenarnya sesuai keadaan perusahaan dari pihak agen yaitu manajemen perusahaan, sehingga tidak terjadi

asimetri informasi sehingga pihak principal dapat mengambil kebijakan dengan tepat (Fiska, 2020). Dalam penelitian ini variabel komite audit dilihat dari jumlah komite audit yang terdaftar pada suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan. Jika jumlah komite audit yang banyak dalam perusahaan dapat menekan terjadinya penghindaran pajak sesuai dengan tugas dari komite audit yaitu mengawasi laporan keuangan suatu perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari (Marlinda et al., 2020) dan (Novilim, 2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance atau penghindaran pajak. Maka bisa disimpulkan hipotesis penelitian ini adalah

H1 : Tata Kelola Perusahaan Yang Diukur Oleh Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.1.2 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Diukur Oleh Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance*

Kualitas audit juga salah satu faktor dari tata kelola perusahaan. Menurut (Syaiyina Ika Listiyadi, 2022) kualitas audit ialah indikator yang digunakan dalam laporan keuangan untuk melihat persepsi tingkat independensi dan keahlian yang dimiliki oleh auditor. Teori keagenan terjadi akibat terdapat perbedaan kepentingan dari pemegang saham dan eksekutif perusahaan. Untuk meminimalisir terjadinya perbedaan kepentingan dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik, yakni kualitas audit yang berprinsip transparansi pada laporan keuangan.

Transparansi menandakan terdapat pengungkapan yang akurat dimana hal tersebut berarti kualitas laporan keuangan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Salah satu faktor dalam transparansi ialah kualitas audit, sebab kualitas audit yang baik ialah pengungkapan yang akurat terkait laporan keuangan yang diaudit KAP. Sehingga kualitas audit dapat memberikan transparansi informasi mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada pemegang saham, termasuk transparansi dalam kewajiban perpajakan (Pratama & Masripah, 2022). Kualitas audit yang baik dapat membantu penyelesaian masalah keagenan manajemen dan pemegang saham, termasuk dalam masalah tax avoidance. Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit memiliki peran dalam melakukan penekanan terjadinya penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mira & Purnamasari, 2020) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena jika suatu perusahaan diaudit oleh KAP Big four dipercaya memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan KAP lainnya yang tidak termasuk KAP Big four maka pada penelitian ini hipotesis dari kualitas audit :

H2 : Tata Kelola Perusahaan Yang Diukur Oleh Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.1.3 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Diukur Oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Komisaris adalah jabatan yang tertinggi setelah pemegang saham. Ketika perusahaan memutuskan tujuan mereka, mengembangkan peraturan yang komprehensif, dan memilih anggota untuk melakukan tujuan dan kebijakan yang tersedia, komite secara hukum bertanggung jawab untuk fokus pada urusan

perusahaan. Dewan memainkan peran sentral dalam tata kelola perusahaan. (Oliviana & Muid, 2019). Berdasarkan teori agensi anggota dewan komite yang berasal dari perusahaan eksternal berfungsi melakukan kontrol kepada perusahaan atau dengan kata lain komisaris independen berperan sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen akan menurun, sehingga jumlah dewan komisaris independen yang meningkat dapat menekan adanya tindakan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan (Fiska, 2020). Anggota komisaris independen yang banyak akan memaksimalkan kinerja atau tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan dengan cara melakukan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Nur'aini dan Halimatusadiah, 2022) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka bisa disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini yaitu

H3 : Tata Kelola Perusahaan Yang Diukur Oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.1.4 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Diukur Oleh Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Menurut (Dewi & Jati, 2014) pada (Rombebunga, 2019) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusional. Kepemilikan institusi yang lebih tinggi akan mendorong upaya pemantauan yang lebih kuat oleh pejabat institusi. Perusahaan bertanggungjawab memenuhi hak pemegang saham.

Oleh karena itu, pemilik institusi mempunyai hak untuk memantapkan manajemen mengambil keputusan terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Dalam teori keagenan, ada interaksi antar pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencegah timbulnya konflik dengan mewajibkan adanya pemantau eksternal yang dapat memantau setiap pihak yang memiliki kepentingan berbeda. (Fiska, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Izzati & Riharjo, 2022) semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan akan menurunkan perusahaan melakukan tindakan tax avoidance. keberadaan pemilik institusional tersebut membuktikan terdapat penekanan dari pihak institusional terhadap manajemen perusahaan agar melaksanakan kebijakan pajak dalam memaksimalkan pendapatan laba kepada investor institusional. Kemampuan pemilik institusi untuk memastikan bahwa perilaku oportunistik manajemen dalam praktik penghindaran pajak dikendalikan dengan baik menunjukkan bahwa pemilik institusi benar dalam menjalankan wewenangnya dalam memantau dan mengendalikan keputusan yang diambil manajemen. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berdampak pada penurunan penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur'aini dan Halimatusadiah, 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu, hipotesis yang dapat diambil pada penelitian ini adalah

H4: Tata Kelola Perusahaan Yang Diukur Oleh Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.1.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Di dalam profitabilitas terdapat beberapa rasio salah satunya adalah ROA (Return On Assets). Pengukuran profitabilitas diproksikan dengan rumus ROA menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan dalam menggunakan asetnya secara efisien untuk mendapatkan profitnya berperan dalam usaha penghindaran pajak. Profitabilitas menunjukkan kemampuan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba (Novilim, 2020). Apabila perusahaan mempunyai nilai ROA yang tinggi maka dikategorikan perusahaan tersebut mempunyai performa keuangan yang baik karena dapat mengelola aset secara maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan.

Berdasarkan teori agensi terdapat konflik tentang hubungan antara pemungut pajak (kantor pajak) dan wajib pajak (pengelola perusahaan) mengenai keuntungan perusahaan. Fiskus ingin memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya melalui pemungutan pajak, namun manajemen berpendapat bahwa perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang besar dengan beban pajak yang rendah. Kedua cara pandang tersebut menimbulkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dan pengelola perusahaan sebagai pembayar pajak. (Fiska, 2020). Dengan demikian semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak dengan baik sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Bandaro & Ariyanto, 2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka, hipotesis pada penelitian ini adalah

H5 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.1.6 Pengaruh *Capital intensity* Terhadap *Tax avoidance*

Capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Malik et al., 2022). *Capital intensity* merupakan rasio aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang kaitannya dengan investasi berupa intensitas modal (aset tetap) dan intensitas persediaan (persediaan). Jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan karena adanya depresiasi yang berasal dari aset tetap tersebut. Didukung dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan kepentingan antara pihak prinsipal (pemilik perusahaan) dan pihak agen (manajemen). Pihak agen dapat melakukan investasi dalam bentuk aset tetap sehingga memanfaatkan adanya biaya depresiasi sebagai pengurang pajak (Safitri & Muid, 2020).

Karena perusahaan yang memiliki banyak aset tetap mempunyai biaya penyusutan dan amortisasi yang lebih tinggi, maka beban pajaknya dapat dikurangi atau dikurangi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap lebih sedikit. Jika ketentuan mengenai penyusutan aset tetap diatur oleh PSAK. Oleh karena itu, dengan menginvestasikan aset tetap pada perusahaannya sendiri, dunia usaha dapat memanfaatkan aset tetapnya untuk meminimalkan beban pajaknya. Semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan maka semakin rendah pula kejadian penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Malik et al., 2022) yang menyatakan

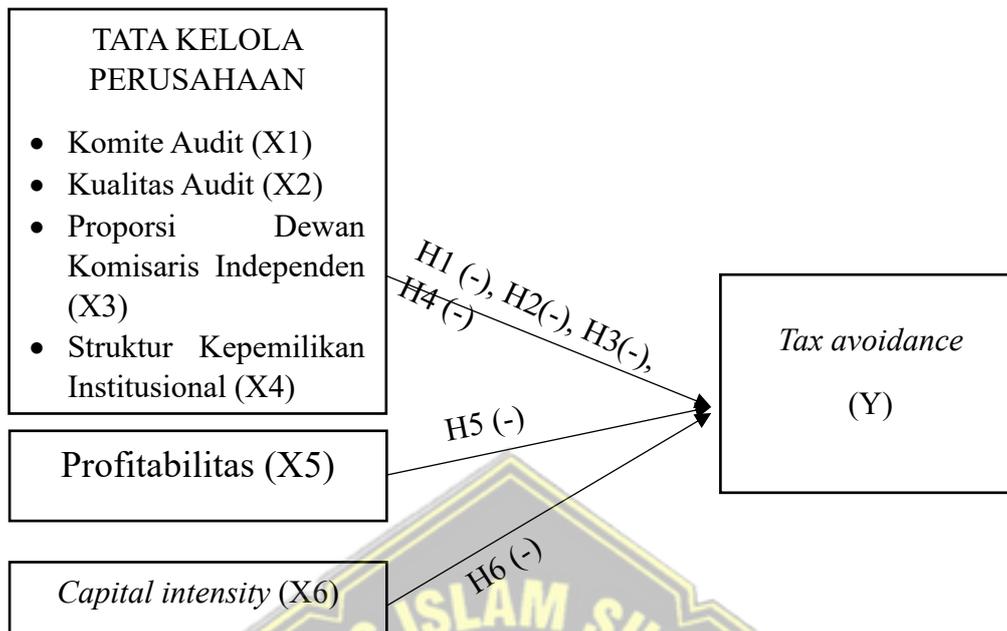
bahwa Capital intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini adalah

H6 : *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan tinjauan teoritis, maka informasi akuntansi dari laporan keuangan yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas dan capital intensity terhadap tax avoidance. Untuk variabel independen pada penelitian ini adalah tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional. Kemudian terdapat variabel dependen lain yakni profitabilitas dan capital intensity. Variabel independen pada penelitian ini adalah tax avoidance.

Pengukuran ini didesain untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit, tata kelola perusahaan yang diukur dengan kualitas audit, tata kelola perusahaan yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen, tata kelola perusahaan yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional, profitabilitas dan capital intensity terhadap tax avoidance. Untuk lebih jelasnya digambarkan seperti dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Desain penelitian ini menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang menganalisa data-data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada uji teori – teori melalui pengukuran variable – variable penelitian dengan angka – angka dan selanjutnya akan menganalisa data tersebut sesuai prosedur statistik (Fiska, 2020). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (explanatory research). Menurut Sugiyono (2017: 6), explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variable – variable yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Alasan utama peneliti ini menggunakan metode penelitian explanatory ialah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang ada di dalam hipotesis.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 hingga 2022. Populasi yang telah ditetapkan peneliti merupakan lingkup yang cukup luas, oleh karena itu peneliti dapat menggunakan beberapa sampel yang telah ditentukan dari populasi tersebut. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang

memiliki karakteristik tertentu. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yang mana pemilihan sampel memiliki kriteria tertentu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Perusahaan *property & real estate* yang melaporkan laporan keuangan di BEI selama tahun 2021 sampai 2022.
2. Perusahaan *property & real estate* yang memiliki data *annual report* yang lengkap dan menggunakan nilai rupiah pada pelaporan keuangannya serta perusahaan yang memiliki laba serta sesuai dengan variabel penelitian yaitu komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independent, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, *Capital intensity* dan penghindaran pajak pada periode 2021 sampai 2022.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data sekunder. yang mana data tersebut diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan alat perantara yang tersedia. Sumber data penelitian ini adalah annual report perusahaan *property & real estate* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2022. Data tersebut dapat dilihat atau diunduh melalui situs resmi ialah www.idx.co.id dan website resmi dari perusahaan *property & real estate* tersebut.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Dokumentasi penelitian, metode ini bertujuan untuk mengumpulkan literatur yang memiliki hubungan dengan pembuatan penelitian. Dokumentasi tersebut dapat berupa melakukan studi pustaka melalui jurnal, *annual report* suatu perusahaan, buku serta penelitian terdahulu untuk memperoleh landasan teori dan teknik menganalisa guna memecahkan sebuah masalah.
2. Pengumpulan *annual report* dari situs resmi www.idx.co.id dan website resmi perusahaan terkait untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

3.5 Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau disebut juga sebagai variabel bebas merupakan variabel yang menjadi pengaruh perubahan variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat dari pengaruh variabel independen. Variabel dalam penelitian ini yaitu :

1. Komite Audit (Variabel Independen)
2. Kualitas Audit (Variabel Independen)
3. Proporsi Dewan Komisaris Independen (Variabel Independen)
4. Struktur Kepemilikan Institusional (Variabel Independen)
5. Profitabilitas (Variabel Independen)

6. *Capital intensity* (Variabel Independen)

7. *Tax avoidance* (Variabel Dependen)

3.5.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Konsep dan Sumber	Pengukuran
1.	Penghindaran Pajak	<p>Tax avoidance adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari pajak.</p> <p>Penghindaran pajak (tax avoidance) didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan mengurangi beban pajaknya secara legal (Jusman & Nosita, 2020)</p>	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ <p>(Malik et al., 2022)</p>
2.	Komite Audit	<p>Komite audit merupakan komite yang dibentuk dan diketuai dari dewan komisaris</p>	

		<p>independen serta memiliki anggota dari komisaris dan atau tenaga handal di luar perusahaan. Komite audit bertanggungjawab kepada dewan komisaris untuk melaksanakan fungsi dan tugas dewan komisaris (Oliviana & Muid, 2019)</p>	<p>$KOA = \Sigma \text{ Komite Audit}$</p> <p>(Izzati & Riharjo, 2022)</p>
3.	Kualitas Audit	<p>Kualitas audit merupakan indikator yang digunakan dalam laporan keuangan guna mengetahui persepsi tingkat independensi dan keahlian yang dimiliki oleh auditor.</p> <p>Kualitas audit yang baik akan membantu menjawab masalah keputusan tax avoidance. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah hal yang harus dilihat untuk mengukur</p>	<p>Dummy:</p> <p>1 = KAP <i>Big-Four</i></p> <p>0 = KAP <i>Non Big-Four</i></p> <p>(Rombebunga, 2019)</p>

		kualitas audit (Syaivina Ika Listiyadi, 2022)	
4.	Proporsi Dewan Komisaris Independen	Dewan komisaris merupakan jabatan tertinggi setelah pemegang saham yang mana memiliki peran dalam tata kelola perusahaan karena perusahaan memiliki tanggung jawab secara hukum dan berfokus pada kepentingan perusahaan untuk menentukan tujuannya, melakukan pengembangan kebijakan, dan memilih anggota untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan yang ada (Oliviana & Muid, 2019)	$PDKI = \frac{JKI}{JSK}$ <p>PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen JKI = Jumlah Komisaris Independen JSK = Jumlah seluruh anggota dewan komisaris independen</p> <p>(Rombebunga, 2019)</p>
5.	Struktur Kepemilikan Institusional	Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham	$KI = \frac{JSPI}{JSB}$

		selain kepemilikan individual yang berasal dari luar perusahaan (Rombebunga, 2019)	<p>KI = Kepemilikan Institusional</p> <p>JSPI = Jumlah Saham Pihak Institusi</p> <p>JSB = Jumlah Saham yang Beredar (Izzati & Riharjo, 2022)</p>
6.	Profitabilitas	<p>Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang menggambarkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan laba yang tinggi dianggap sebagai perusahaan yang berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan pastinya sesuai dengan harapan pemilik perusahaan dan para stakeholdernya (Safitri & Muid, 2020)</p>	<p>ROA</p> $= \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ <p>(Izzati & Riharjo, 2022)</p>
7.	<i>Capital intensity</i>	<i>Capital intensity</i> menjelaskan seberapa besar perusahaan	

	melakukan investasi asetnya dalam bentuk aset tetap (Malik et al., 2022)	$CAP = \frac{Total\ Aset\ Tetap\ Bersih}{Total\ Aset}$ (Bandaro & Ariyanto, 2020)
--	--	---

3.6 Teknis Analisis

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis sebelumnya, teknik analisis ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis. Pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas dan *Capital intensity* terhadap penghindaran pajak dapat diukur menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Program yang digunakan sebagai alat analisis adalah SPSS *Versi 26*.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan jenis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data tersebut yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan statistik deskriptif dapat diketahui rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi pada variabel independen yaitu komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris Independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, *Capital intensity* dan variabel dependennya adalah penghindaran pajak pada perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2022.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan uji regresi linear berganda agar dapat menggambarkan hubungan yang valid. Uji ini juga merupakan pengujian kelayakan atas model regresi yang akan dilakukan nantinya. Jenis uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Dalam pengujian normalitas bisa menginformasikan apakah dalam model regresi yang dilakukan terdapat variabel residual/pengganggu dan memiliki distribusi yang normal ataupun tidak. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual apakah memiliki distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik untuk jumlah sampel kecil menjadi tidak valid. Analisis grafik dan uji statistik merupakan cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Imam Ghazali, 2016). Metode yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah kolmogorov smirnov untuk mendeteksi normal tidaknya residualnya. Model ini sama dengan asumsi normalitas yang mana dapat diketahui bahwa pengujian dengan menggunakan kolmogorov smirnov tidak signifikan memiliki nilai $\geq 0,05$. Kemudian jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menggambarkan ada atau tidaknya korelasi dari variabel bebas/independen yang terdapat pada penelitian ini. Tujuan

dari uji multikolinearitas yakni untuk menguji adanya korelasi atau hubungan diantara variabel bebas pada model regresi. Seharusnya pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi pada sesama variabel independent. Variabel dependent tidak ortogonal jika memiliki korelasi. Variabel ortogonal dapat dimaknai sebagai variable independent yang memiliki nilai korelasi sama dengan 0 antar sesama variabel independent (Imam Ghozali, 110). Model regresi pada penelitian ini dapat dikatakan baik jika antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Cara yang digunakan pada penelitian ini dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance $> 0,10$ memiliki arti terdapat indikasi bahwa variabel tersebut memiliki multikolonieritas dan jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dapat diartikan tidak terdeteksi adanya multikolonieritas antar variabel independen.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi linier yang dilakukan terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan periode sebelumnya (t-1). Ghazali (2017:121) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW), dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah :

1. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (d_U) dan ($4-d_U$) maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (d_L) maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila DW lebih besar dari ($4-d_U$) maka koefisien autokorelasinya lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi.
4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (d_U) dan bawah (d_L) atau DW terletak antara ($4d_U$) dan ($4-d_L$) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi mengalami perbedaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan Homoskedastisitas jika terjadi ketidaksamaan disebut dengan Heteroskedastisitas. Bila residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (Homoskedastisitas) maka tergolong pada model regresi yang baik (Imam Ghazali, 112). Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* yang bertujuan untuk mengembalikan nilai absolut dari nilai residual atas variabel model regresi. Ketentuan uji *glejser* yakni apabila signifikansi $> 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila signifikansi $< 0,05$ artinya terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Model Regresi Berganda

3.7.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua terhadap variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas/independen yaitu komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas dan *Capital intensity*, secara parsial maupun simultan terhadap variabel terikat/dependen yakni *tax avoidance*. Adapun persamaan regresinya yaitu sebagai berikut :

$$CETR = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

CETR : *Tax avoidance*

α_0 : Konstanta

$\beta_1 X_1$: Koefisien Regresi Variabel Komite Audit (X1)

$\beta_2 X_2$: Koefisien Regresi Variabel Kualitas Audit (X2)

$\beta_3 X_3$: Koefisien Regresi Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (X3)

$\beta_4 X_4$: Koefisien Regresi Variabel Struktur Kepemilikan Institusional (X4)

$\beta_5 X_5$: Koefisien Regresi Variabel Profitabilitas (X5)

$\beta_6 X_6$: Koefisien Regresi Variabel *Capital intensity* (X6)

e : Error (Kesalahan Pengganggu)

3.8 Uji Goodness Of Fit

3.8.1 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji statistik F atau yang dikenal dengan istilah uji signifikansi simultan dilakukan untuk menentukan apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian atau tidak. Kriteria yang digunakan untuk menguji kelayakan model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikansi $\leq 0,05$, menunjukkan model regresi fit atau layak digunakan dalam penelitian.
2. Jika tingkat signifikansi $> 0,05$, menunjukkan model regresi tidak fit atau tidak layak digunakan dalam penelitian.

3.8.2 Koefisien Determinasi (R^2)

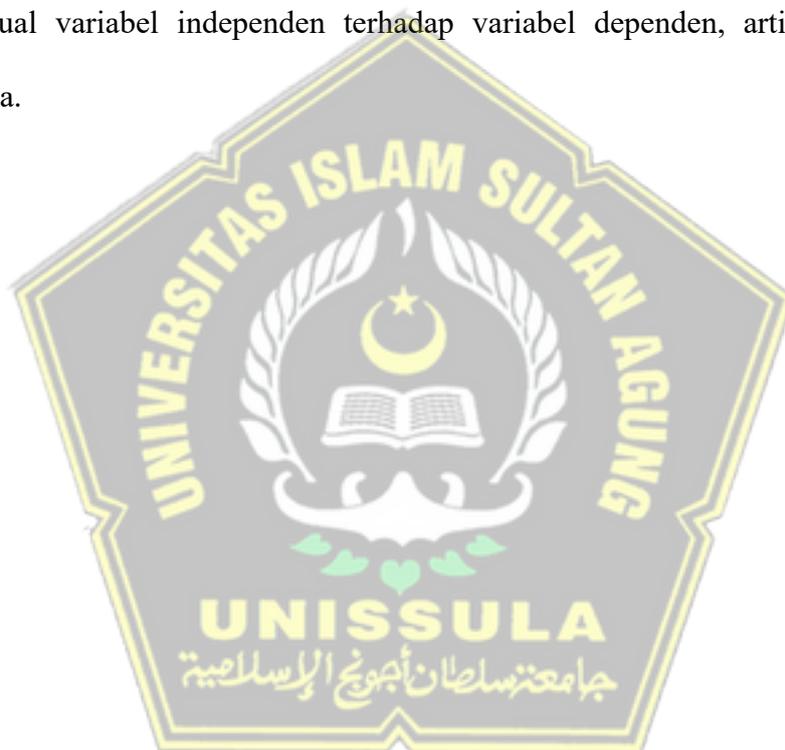
Koefisien determinasi (R^2) adalah analisis yang mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel Y. Nilai koefisien determinasi yaitu 0 sampai 1. Nilai dikatakan terbatas jika (R^0) kecil artinya variabel X dalam menjelaskan variasi variabel masih terbatas. Nilai (R^0) yang mendekati 1 menandakan variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.8.3 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t atau uji signifikansi parameter individual adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Uji t dapat memberikan hasil yang positif maupun negatif. Nilai positif menunjukkan variabel independen tersebut berbanding lurus terhadap variabel dependen, sedangkan hasil negatif menunjukkan variabel

independen tersebut berbanding terbalik terhadap variabel dependen. Berikut acuan untuk menentukan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen :

1. Jika nilai signifikansi t-test $< 0,05$, maka terdapat pengaruh secara individual variabel independen terhadap variabel dependen, artinya H_a diterima.
2. Jika nilai signifikansi t-test $\geq 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen terhadap variabel dependen, artinya H_a tidak diterima.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa annual report dan laporan keuangan dari masing-masing perusahaan yang diperoleh dari website resmi dari setiap perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dimana pemilihan sampel memiliki kriteria tertentu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Jumlah perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah 92 perusahaan dengan periode penelitian 2 tahun sehingga jumlah sampel pengamatan adalah 184.

Berikut dibawah ini merupakan rincian dari data sampel yang digunakan dalam penelitian :

Tabel 4.1

Perincian Sampel

Jumlah populasi perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	184
Dikurangi dengan perusahaan property & real estate yang mengalami kerugian	60

Dikurangi dengan perusahaan property & real estate yang tidak menerbitkan annual report tahun 2021 sampai 2022	56
Dikurangi dengan laporan keuangan perusahaan property & real estate yang tidak lengkap	8
Jumlah sampel yang diteliti	60

Berdasarkan rincian diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah 92 perusahaan dengan periode penelitian 2 tahun sehingga jumlah sampel pengamatan adalah 184 dikurangi dengan perusahaan property & real estate yang mengalami kerugian, perusahaan property & real estate yang tidak menerbitkan annual report dan website tidak dapat diakses, dan laporan keuangan perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data sesuai dengan variable penelitian sebesar 124. Oleh karena itu, jumlah sampel yang siap diolah sejumlah 30 perusahaan dengan periode selama 2 tahun sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 60 data.

4.2 Analisis Deskripsi Uji Variabel Penelitian

Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Jumlah	Min	Maks	Median	Mean	Std. Deviation
X1	60	2	4	3,00	2,97	0,317
X2	60	0	1	0,00	0,17	0,376
X3	60	0,200	0,667	0,366	0,420	0,116
X4	60	0,169	0,999	0,688	0,637	0,198

X5	60	0,001	0,412	0,375	0,050	0,064
X6	60	0,019	0,901	0,466	0,475	0,230
Y	60	0,000	0,923	0,049	0,114	0,160

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2023

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komite Audit (X1)

Hasil analisis deskriptif pada variabel komite audit menunjukkan bahwa diperoleh jumlah perusahaan sebanyak 60 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan nilai minimum 2 yang dicapai oleh perusahaan Roda Vivatex Tbk & Diamond Citra Propertindo Tbk. Sedangkan nilai nilai maksimum sebesar 4 yang dicapai oleh perusahaan Kawasan Industri Jababeka Tbk. Nilai rata – rata atau mean sebesar 2,97. Nilai median menunjukkan 3,00 lebih besar dari nilai mean artinya jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan belum dikatakan baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,317 lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean menunjukkan data menyebar dengan merata sehingga tidak terjadi penyimpangan data yang tinggi dalam penelitian.

2. Kualitas Audit (X2)

Hasil analisis deskriptif pada variabel kualitas audit menunjukkan bahwa diperoleh jumlah perusahaan sebanyak 60 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan nilai minimum 0,200 yang dicapai oleh beberapa perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big-Four. Sedangkan nilai nilai maksimum sebesar 1 yang dicapai oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP Big- Four. Nilai rata – rata atau mean sebesar

0,17. Nilai median menunjukkan 0,00 lebih kecil dari nilai mean artinya kualitas audit yang dimiliki perusahaan sudah baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,376 lebih besar dibandingkan dengan nilai mean menunjukkan data menyebar dengan tidak merata sehingga tidak terjadi penyimpangan data yang tinggi dalam penelitian.

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X3)

Hasil analisis deskriptif pada variabel proporsi dewan komisaris independen menunjukkan bahwa diperoleh jumlah perusahaan sebanyak 60 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan nilai minimum 0,200 yang dicapai oleh perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,667 yang dicapai oleh perusahaan Mega Manunggal Property Tbk. & PP Properti Tbk. Nilai rata – rata atau mean sebesar 0,420. Nilai median menunjukkan 0,366 lebih kecil dari nilai mean artinya jumlah proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan dikatakan baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,116 lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean menunjukkan data menyebar dengan merata sehingga tidak terjadi penyimpangan *data* yang tinggi dalam penelitian.

4. Struktur Kepemilikan Institusional (X4)

Hasil analisis deskriptif pada variabel struktur kepemilikan institusional menunjukkan bahwa diperoleh jumlah perusahaan sebanyak 60 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan nilai minimum 0,169 yang dicapai oleh perusahaan Mega Manunggal Property Tbk. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,999 yang dicapai oleh perusahaan Winner Nusantara Jaya Tb pada tahun 2021. Nilai rata – rata atau mean sebesar 0,637. Nilai median menunjukkan 0,688 lebih besar dari nilai mean artinya jumlah struktur kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan

belum dikatakan baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,198 lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean menunjukkan data menyebar dengan merata sehingga tidak terjadi penyimpangan *data* yang tinggi dalam penelitian.

5. Profitabilitas (X5)

Hasil analisis deskriptif pada variabel profitabilitas menunjukkan bahwa diperoleh jumlah perusahaan sebanyak 60 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan nilai minimum 0,001 yang dicapai oleh perusahaan PP Properti Tbk pada tahun 2022. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,412 yang dicapai oleh perusahaan Winner Nusantara Jaya Tbk pada tahun 2022. Nilai rata – rata atau mean sebesar 0,506. Nilai median menunjukkan 0,037 lebih kecil dari nilai mean artinya jumlah/ tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan dikatakan baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,064 lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean menunjukkan data menyebar dengan merata sehingga tidak terjadi penyimpangan *data* yang tinggi dalam penelitian.

6. *Capital intensity* (X6)

Hasil analisis deskriptif pada variabel *capital intensity* menunjukkan bahwa diperoleh jumlah perusahaan sebanyak 60 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan nilai minimum 0,019 yang dicapai oleh perusahaan Trimitra Prawara Goldland Tbk pada tahun 2022. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,901 yang dicapai oleh perusahaan Plaza Indonesia Realty Tbk. pada tahun 2021. Nilai rata – rata atau mean sebesar 0,475. Nilai median menunjukkan 0,466 lebih kecil dari nilai mean artinya jumlah/ tingkat *capital intensity* yang dimiliki perusahaan dikatakan baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,230 lebih kecil dibandingkan dengan

nilai mean menunjukkan data menyebar dengan merata sehingga tidak terjadi penyimpangan *data* yang tinggi dalam penelitian.

7. *Tax avoidance* (Y)

Hasil analisis deskriptif pada *tax avoidance* menunjukkan bahwa diperoleh jumlah perusahaan sebanyak 60 perusahaan. Nilai minimum pada *tax avoidance* sebesar 0,000 dicapai oleh perusahaan Roda Vivatex Tbk tahun 2021. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi, apabila nilai CETR kurang dari 22% maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*. Sedangkan nilai maksimum pada *tax avoidance* sebesar 0,923 dicapai oleh perusahaan Kawasan Industri Jababeka Tbk tahun 2022. Hal ini Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi, apabila nilai CETR lebih besar dari 22% maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Nilai rata – rata atau mean sebesar 0,114. Nilai median pada *tax avoidance* sebesar 0,049 lebih kecil dari nilai mean yang artinya terdapat beberapa perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*. Kemudian nilai standar deviasi sebesar 0,160 lebih besar dari nilai mean menunjukkan data menyebar tidak merata sehingga bisa terjadi penyimpangan data yang tinggi dalam penelitian.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dapat menginformasikan apakah dalam model regresi yang dilakukan terdapat variabel pengganggu atau residual dengan distribusi

normal atau tidak. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual apakah memiliki distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik untuk jumlah sampel kecil menjadi tidak valid. Analisis grafik dan uji statistik merupakan cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Imam Ghozali, 2016). Metode yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah kolmogorov smirnov untuk mendeteksi normal tidaknya residualnya. Indikator uji ini sama dengan uji normalitas yang mana pengujian yang menggunakan kolmogorov smirnov menunjukkan tidak signifikan apabila $\text{sig} \geq 0,05$. Sementara jika nilai probabilitasnya dengan $\text{sig} \leq 0,05$ maka distribusi dikatakan tidak normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		60	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.14379563	
Most Extreme Differences	Absolute	.144	
	Positive	.144	
	Negative	-.108	
Test Statistic		.144	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.150 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.140
		Upper Bound	.159

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,150 atau

15,0%. Berdasarkan nilai signifikansi dari uji *kolmogrov Smirnov*, maka data yang diajukan berdistribusi normal karena nilai signifikansi adalah sebesar $0,150 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian pada variabel tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, variabel profitabilitas, variabel *capital intensity*, dan variabel *tax avoidance* dikatakan normal.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas yakni untuk menguji adanya korelasi atau hubungan diantara variabel bebas pada model regresi. Seharusnya pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi pada sesama variabel independen. Variabel dependent tidak ortogonal jika memiliki korelasi. Variabel ortogonal dapat dimaknai sebagai variabel independen yang memiliki nilai korelasi sama dengan 0 antar sesama variabel independen (Imam Ghazali, 110). Model regresi dalam penelitian ini dikatakan baik apabila antar variabel independen yang diambil tidak terjadi korelasi. Berikut cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian ini, yaitu Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila ada variabel independen yang dimiliki nilai tolerance lebih dari sama dengan 0,10 berarti ada indikasi bahwa variabel tersebut memiliki multikolonieritas dan jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 maka tidak terdeteksi adanya multikolonieritas antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Komite Audit	.931	1.074
	Kualitas Audit	.801	1.248
	Proporsi Dewan Komisaris Independen	.769	1.301
	Struktur Kepemilikan Institusional	.798	1.254
	Profitabilitas	.897	1.115
	Capital intensity	.852	1.174

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas semua variabel penelitian yang terdiri dari tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independent, struktur kepemilikan institusional, variabel profitabilitas, dan variabel *capital intensity* mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,931, 0,801, 0,769, 0,798, 0,897, dan 0,852. Hal ini menjelaskan bahwa nilai *tolerance* pada setiap variabel penelitian > 0.10 . Kemudian nilai VIF pada tabel di atas adalah 1,074, 1,248, 1,301, 1,254, 1,115, dan 1,174 memiliki nilai VIF $<$ dari 10. Dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak terjadi multikolinearitas atau bisa dikatakan tidak ada korelasi yang signifikan antara semua variabel penelitian sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada atau tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai Durbin-Watson, yaitu nilai DW dianggap tidak berbahaya jika terletak di daerah $du < dw < 4 - du$. Dibawah ini merupakan hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

No.	Durbin-Watson	Keterangan
1	2,131	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin -Watson* yang diperoleh sebesar 2,131. Dimana diketahui bahwa nilai dU berdasarkan t tabel adalah 1,8082. Sehingga berdasarkan kriteria uji autokorelasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$= dU < dw < 4 - dU$$

$$= 1,8082 < 2,131 < 4 - 1,8082$$

$$= 1,8082 < 2,131 < 2,1918$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai dw sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu nilai $dw > \text{nilai } dU$, dan nilai $dw < 4 - dU$. Hal ini sudah sesuai dengan konsep uji autokorelasi yang mana menandakan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data tersebut.

4.4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedasitas digunakan sebagai penguji apakah dalam model regresi mengalami perbedaan variabel dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan Homokedasitas jika terjadi ketidaksamaan disebut dengan Heterokedasitas. Bila residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (Homokedasitas) maka tergolong pada model regresi yang baik (Imam Ghozali, 112). Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari uji glejser dengan tujuan untuk mengembalikan absolut dari residual dari variabel model regresi. Ketentuan uji glejser yakni apabila signifikansi $> 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila signifikansi $< 0,05$ artinya terjadi heteroskedastisitas. Tabel dibawah adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser:

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

No.	Variabel	Sig.	Keterangan
1.	Komite Audit	0,586	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
2.	Kualitas Audit	0,565	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
3.	Proporsi Dewan Komisaris Independen	0,234	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
4.	Struktur Kepemilikan Institusional	0,205	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
5.	Profitabilitas	0,056	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
6.	<i>Capital intensity</i>	0,059	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel dalam uji heteroskedastisitas sebesar 0,586 (Komite Audit), 0,565 (Kualitas Audit), 0,234 (Proporsi Dewan Komisaris Independen), 0,205 (Struktur Kepemilikan Institusional), 0,56 (Profitabilitas), dan 0,059 (*Capital intensity*). Batas minimal nilai signifikansi pada uji heteroskedastisitas sebesar 0,05. Dari hasil

tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diuji memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan penelitian ini dinyatakan lolos untuk analisis selanjutnya.

4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh tata Kelola perusahaan yang diukur menggunakan komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, *capital intensity terhadap tax avoidance*. Dengan menggunakan sampel penelitian pada perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 – 2022. Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
1	(Constant)	0,149	0,073	0,046
2	Komite Audit	0,102	0,023	0,000
3	Kualitas Audit	0,061	0,020	0,004
4	Proporsi Dewan Komisaris Independen	-0,226	0,060	0,000
5	Struktur Kepemilikan Institusional	-0,143	0,032	0,000
6	Profitabilitas	-0,897	0,106	0,000
7	<i>Capital intensity</i>	-0,245	0,032	0,000

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil dari perhitungan yang didapatkan dari pengaruh variabel tata kelola perusahaan yang dihitung oleh

komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independent, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, yang mana dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

$$Y = 0,149 + 0,102 + 0,061 + (0,226) + (0,143) + (0,897) + (0,245) + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta dalam perhitungan regresi untuk variabel *tax avoidance* sebesar 0,149 bertanda positif dan nilai sig 0,046 ($< 5\%$). Hal ini artinya apabila variabel tata kelola perusahaan yang diukur oleh komite audit (X1), kualitas audit (X2), proporsi dewan komisaris independent (X3), struktur kepemilikan institusional (X4), profitabilitas (X5), *capital intensity* (X6) dianggap tetap / konstan, maka besarnya variabel *tax avoidance* (Y) adalah sebesar 0,149.
2. Nilai koefisien pada variabel tata kelola perusahaan yang diukur oleh komite audit terhadap *tax avoidance* sebesar 0,102 bertanda positif dan nilai sig 0,000 ($< 5\%$) artinya tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan komite audit berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan semakin banyak komite audit maka akan meningkatkan *tax avoidance*.
3. Nilai koefisien pada variabel tata kelola perusahaan yang diukur oleh kualitas audit terhadap *tax avoidance* sebesar 0,061 bertanda positif dan nilai sig 0,004 ($< 5\%$) artinya tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan kualitas audit

berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan semakin baik kualitas audit maka meningkatkan *tax avoidance*.

4. Nilai koefisien pada variabel tata kelola perusahaan yang diukur oleh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* sebesar -0,226 bertanda negatif dan nilai sig 0,000 ($< 5\%$) artinya tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka dapat menurunkan tingkat *tax avoidance*.
5. Nilai koefisien pada variabel tata kelola perusahaan yang diukur oleh struktur kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* sebesar -0,143 bertanda negatif dan nilai sig 0,000 ($< 5\%$) artinya tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi struktur kepemilikan institusional maka dapat menurunkan tingkat *tax avoidance*.
6. Nilai koefisien pada variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance* sebesar -0,897 bertanda negatif dan nilai sig 0,000 ($< 5\%$) artinya variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi profitabilitas maka dapat menurunkan tingkat *tax avoidance* pada variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance* sebesar -0,897 bertanda negatif maka hasil tersebut berarti bahwa setiap kenaikan satu – kesatuan variabel profitabilitas akan menekan nilai CETR sebesar 0,897. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas atau nilai ROA maka akan menekan tindakan *tax avoidance*.

7. Nilai koefisien pada variabel *capital intensity* (X6) terhadap *tax avoidance* sebesar -0,245 bertanda negatif dan nilai sig 0,000 ($< 5\%$) artinya variabel *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi *capital intensity* maka dapat menurunkan tingkat *tax avoidance*

4.5 Hasil Uji Goodness Of Fit

4.5.1 Hasil Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat dan memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ketentuan pada uji F yakni apabila nilai Sig F $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sebaliknya jika nilai Sig F $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan ketentuan tersebut, maka hasil uji signifikansi simultan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikasi Simultan

No	Model	Sig.	Keterangan
1	Regression	,000 ^b	Hipotesis Diterima

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2023

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi 0,000. Hal ini artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil perolehan menunjukkan bahwa model tersebut dikatakan layak karena H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel independent yaitu tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independent, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *capital intensity* berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar pengaruh antara sales growth, profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity terhadap *tax avoidance*. Penentuan sampel pada penelitian ini adalah total sampel dengan melihat hasil uji koefisien determinasi pada kolom Adjusted R Square (R^2). Berikut ini merupakan hasil uji dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

No	Adjusted R Square
1	0,891

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2023

Hasil yang diperoleh dari perhitungan pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa Adjusted R Square (R^2) yaitu sebesar 0,891 atau 89,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat dijelaskan sebesar 89,1% oleh variabel independent yaitu tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independent, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *capital intensity*. Sedangkan 10,9% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang belum dilakukan oleh penelitian ini.

4.6 Hasil Uji Pengujian Hipotesis

4.6.1 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk tujuan mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independennya konstan. Berikut adalah hasil uji t pada penelitian ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi t

No	Model	t	Sig	Keterangan
1	Komite Audit terhadap <i>tax avoidance</i>	4,554	,000	Ha Diterima
2	Kualitas Audit terhadap <i>tax avoidance</i>	3,002	,004	Ha Diterima
3	Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap <i>tax avoidance</i>	-3,782	,000	Ha Diterima
4	Struktur Kepemilikan Institusional terhadap <i>tax avoidance</i>	-4,427	,000	Ha Diterima
5	Profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i>	-8,444	,000	Ha Diterima
6	<i>Capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	-7,662	,000	Ha Diterima

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 dapat menjelaskan mengenai interpretasi atas variabel independen yaitu tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *capital intensity* dan variabel dependen *tax avoidance* sebagai berikut:

1. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur oleh Komite Audit terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit memiliki nilai t hitung sebesar 4,554 dengan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05. Dari perolehan tersebut maka hasil penelitian ini menunjukkan **hipotesis 1 ditolak**.

2. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur oleh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel tata kelola perusahaan yang diukur dengan kualitas audit memiliki nilai hitung sebesar 3,002 dengan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05. Dari perolehan tersebut maka hasil penelitian ini menunjukkan **hipotesis 2 ditolak**.

3. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel tata kelola perusahaan yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai hitung sebesar -3,782 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari perolehan tersebut maka hasil penelitian ini menunjukkan **hipotesis 3 diterima**.

4. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur oleh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel tata kelola perusahaan yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional memiliki nilai t hitung sebesar -4,427 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari perolehan tersebut maka hasil penelitian ini menunjukkan **hipotesis 4 diterima**.

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai t hitung sebesar -8,444 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari perolehan tersebut maka hasil penelitian ini menunjukkan **hipotesis 5 diterima**.

6. Pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel capital intensity memiliki nilai t hitung sebesar -7,662 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari perolehan tersebut maka hasil penelitian ini menunjukkan **hipotesis 6 diterima**.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Komite Audit terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Maka berarti hasil ini tidak sama dengan hipotesis yang telah diajukan yang mengatakan tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dilihat dari hasil analisis deskriptif pada nilai mean atau rata-rata dari komite audit sebesar 2,97. Hasil statistik deskriptif variabel tax avoidance menunjukkan hasil nilai mean sebesar 0,114 lebih besar dari nilai median sebesar 0,049. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya komite audit maka akan semakin tinggi tingkat tax avoidance. Pada penelitian ini komite audit dilihat dari jumlah komite audit yang terdaftar pada perusahaan itu sendiri. Jika jumlah komite audit yang banyak dalam perusahaan

dapat menekan terjadinya penghindaran pajak sesuai dengan tugas dari komite audit yaitu mengawasi laporan keuangan suatu perusahaan. Akan tetapi pada penelitian ini justru memiliki hasil yang berbanding terbalik. Jika komite audit naik maka tingkat tax avoidance naik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Plutzer, 2021) variabel komite audit berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap penghindaran pajak. Komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan, oleh karena itu struktur dan pemilihan keanggotaan komite audit merupakan tanggung jawab dewan komisaris. Perusahaan dengan komite audit yang banyak tetapi menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang kecil akan cenderung memberikan pengawasan dan pemantauan keuangan yang tidak efektif. Adanya tekanan dari dewan komisaris juga akan membuat komite audit mengabaikan kinerja manajer dalam menyusun laporan keuangan sehingga kinerjanya tidak maksimal dan manajer dapat melakukan penghindaran pajak dengan mudah. Sehingga semakin banyak komite audit maka semakin banyak penghindaran pajak. Pada peraturan otoritas jasa keuangan no. 55/PJOK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit mengatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independent dan pihak dari luar emiten/ perusahaan publik.

Hasil hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak dikarenakan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Plutzer, 2021) mengatakan yaitu komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oliviana

& Muid, 2019) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

4.7.2 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*

Hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan yang mengatakan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dilihat dari hasil analisis deskriptif pada nilai mean dari kualitas audit sebesar 0,17 lebih besar dari nilai median dari kualitas audit sebesar 0,00 hal ini berarti kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Pada penelitian ini kualitas audit dapat dilihat dari kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut. Jika kualitas audit suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big four independensi dari hasil tersebut akan lebih akurat daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big four. Hasil dari penelitian ini yaitu jika kualitas audit baik maka akan menaikkan tingkat tax avoidance berbanding terbalik dengan hipotesis pada penelitian ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2023) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada arah yang positif yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas audit, maka semakin perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena dalam penelitian ini sampel perusahaan nya lebih banyak diaudit oleh KAP non the big four. KAP the big four dan KAP non the big four memiliki kualitas dan integritas yang baik akan tetapi

terdapat perbedaan jangkauan klien serta dari segi biaya KAP non the big four lebih terjangkau sehingga dapat membuat perusahaan pada sampel lebih memilih untuk menggunakan KAP non the big four. KAP non the big four kecenderungannya memiliki standar keahlian dan komitmen terhadap kinerja yang kurang atau belum sekuat KAP the big four, seperti kurang mementingkan transparansi dan independensi. Pada hasil tabulasi data kenyataannya perusahaan property & real estate tahun 2021 sampai 2022 mayoritas diaudit oleh KAP non Big four.

Hasil hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak dikarenakan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oliviana & Muid, 2019) dan (Wijaya, 2023) yang mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rombebunga, 2019) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

4.7.3 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan yang mengatakan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dilihat dari hasil analisis deskriptif pada nilai mean atau rata-rata dari proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,420 lebih besar dari nilai median dari

proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,366 hal ini berarti proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Pada penelitian ini proporsi dewan komisaris independen dilihat dari jumlah dewan komisaris independent dibagi dengan seluruh jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan. Jika jumlah proporsi dewan komisaris independen yang banyak maka dapat menekan tingkat tax avoidance. Pada suatu perusahaan anggota dewan komite yang berasal dari perusahaan eksternal berfungsi melakukan kontrol kepada perusahaan atau dengan kata lain komisaris independen berperan sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen akan menurun, sehingga jumlah dewan komisaris independen yang meningkat dapat menekan adanya tindakan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Pada perusahaan property & real estate pada tahun 2021 sampai 2022 memiliki dewan komisaris yang melakukan tugas pengawasannya dengan baik.

Hasil hipotesisi ketiga pada penelitian ini diterima karena penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur'aini dan Halimatusadiah, 2022) yang mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

4.7.4 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan yang mengatakan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dilihat dari hasil analisis deskriptif pada nilai mean atau rata-rata dari struktur kepemilikan institusional sebesar 0,637. Hasil statistik deskriptif variabel *tax avoidance* menunjukkan hasil nilai mean sebesar 0,114 lebih besar dari nilai median sebesar 0,049. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya struktur kepemilikan institusional maka akan semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Pada penelitian ini struktur kepemilikan institusional dilihat dari jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham beredar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka, jika jumlah struktur kepemilikan institusional yang banyak maka dapat menekan tingkat *tax avoidance*. Kepemilikan institusional yang memiliki nilai tinggi akan menyebabkan usaha pengawasan yang lebih besar dari pihak institusional. Pemilik institusional berhak untuk memastikan manajemen perusahaan melakukan keputusan yang akan mensejahterakan pemegang saham dengan maksimal. Hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham yang harus dipenuhi. Di dalam teori agensi ada interaksi antar pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Masing-

masing pihak tersebut mempunyai kepentingan pribadi sehingga dapat mengakibatkan konflik. Maka dari itu perusahaan harus mencegah terjadinya konflik itu dengan cara diperlukan adanya monitor dari pihak luar yang dapat memantau masing-masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa jika kepemilikan institusional tinggi maka tingkat tax avoidance akan menurun.

Hasil hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur'aini dan Halimatusadiah, 2022) yang mengatakan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rombebunga, 2019) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

4.7.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dilihat dari hasil analisis deskriptif pada nilai mean atau rata-rata dari profitabilitas sebesar 0,050. Hasil statistik deskriptif variabel tax avoidance menunjukkan hasil nilai mean sebesar 0,114 lebih besar dari nilai median sebesar 0,049. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya profitabilitas maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance. Pada penelitian ini profitabilitas dilihat dari

ROA yang mana laba bersih setelah pajak dibagi dengan total asset. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Maka, jika nilai profitabilitas perusahaan tinggi maka akan semakin rendah perusahaan melakukan tax avoidance dan perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan peraturan. Perusahaan dengan berpenghasilan tinggi tidak akan memiliki masalah untuk membayar pajak karena memiliki arus kas yang cukup untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang rendah akan memberatkan perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak dikarenakan memiliki laba yang rendah jika harus dikurangkan dengan pembayaran pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi persepsi kinerja manajemen serta imbalan yang agen dapatkan. Dengan kondisi tersebut, manajemen mungkin akan mencari solusi dari perundang-undangan supaya meminimalkan pajak yang dibayarkan. Dengan demikian semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak dengan baik sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sehingga hipotesis lima pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bandaro & Ariyanto, 2020) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Izzati & Riharjo, 2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

4.7.6 Pengaruh Capital intensity terhadap Tax avoidance

Hasil Penelitian ini menghasilkan capital intensity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan yang mengatakan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dilihat dari hasil analisis deskriptif pada nilai mean dari capital intensity sebesar 0,475 lebih besar dari nilai median dari capital intensity sebesar 0,466 hal ini berarti capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. Pada penelitian ini capital intensity dapat dilihat dari kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut. Pada penelitian ini capital intensity dilihat dari total asset tetap bersih dibagi dengan total aset. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Maka, jika perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap tinggi maka akan semakin besar penyusutan atau mempunyai beban pajak yang lebih rendah dari pada perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah. Yang mana ketentuan penyusutan aset tetap telah diatur oleh PSAK. Akhirnya perusahaan bisa mengelola aset tetap untuk mengurangi beban/biaya pajak melalui cara aset tetap diinvestasikan. Semakin besar Capital intensity pada perusahaan maka dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sehingga hipotesis enam pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Malik et al., 2022) yang mengatakan bahwa capital intensity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020) yang menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 sampai dengan 2022 mengenai pengaruh tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan total 184 perusahaan yang menjadi populasi sampel penelitian dan data yang dapat diolah dalam penelitian sebanyak 60 perusahaan. Data tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dengan kata lain hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi komite audit maka tax avoidance juga ikut tinggi begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu diketahui bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan komite audit dapat berpengaruh secara langsung terhadap tax avoidance dengan arah positif.
2. Tata kelola perusahaan yang diukur dengan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dengan kata lain hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. Yang mana menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit maka tax avoidance juga ikut tinggi begitu pula

sebaliknya. Oleh karena itu diketahui bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan kualitas audit dapat berpengaruh secara langsung terhadap tax avoidance dengan arah positif.

3. Tata kelola perusahaan yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dengan kata lain hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka tax avoidance semakin rendah begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu diketahui bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen dapat berpengaruh secara langsung terhadap tax avoidance dengan arah negatif. Tata kelola perusahaan yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi struktur kepemilikan institusional maka *tax avoidance* semakin rendah begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu diketahui bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional dapat berpengaruh secara langsung terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif.
4. Tata kelola perusahaan yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dengan kata lain hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi struktur kepemilikan institusional maka tax avoidance semakin rendah begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu

diketahui bahwa tata kelola perusahaan yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional dapat berpengaruh secara langsung terhadap tax avoidance dengan arah negatif. *Capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain hipotesis keenam pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* maka *tax avoidance* semakin rendah begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu diketahui bahwa *capital intensity* dapat berpengaruh secara langsung terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif.

5. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dengan kata lain hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka tax avoidance semakin rendah begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu diketahui bahwa profitabilitas dapat berpengaruh secara langsung terhadap tax avoidance dengan arah negatif.
6. Capital intensity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dengan kata lain hipotesis keenam pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi capital intensity maka tax avoidance semakin rendah begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu diketahui bahwa capital intensity dapat berpengaruh secara langsung terhadap tax avoidance dengan arah negatif.

5.2 Implikasi

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat diambil dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah referensi, wawasan, dan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pemahaman teoritis tentang *tax avoidance*.

2. Implikasi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan memahami bagaimana tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independent, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, capital intensity berdampak pada tingkat *tax avoidance* serta membantu perusahaan dalam mengelola reputasi dan tanggung jawab sosial mereka terkait praktik perpajakan. Selain itu bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang berdasarkan penemuan serta kelemahan yang terdapat pada penelitian ini.

5.3 Keterbatasan

Dalam melakukan analisis, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya, Terdapat beberapa website yang tidak diakses sehingga penulis kesulitan untuk memperoleh data, terdapat perusahaan yang tidak mengupload annual report sehingga penulis kesulitan untuk memperoleh data dan minimnya objek penelitian.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan keterbatasan pada penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut, Bagi perusahaan, sebaiknya tetap memantau tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan

komite audit, kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan capital intensity sebagai upaya untuk meminimalkan praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Bagi regulator, diharapkan memperketat pengawasan kepada perusahaan, merancang peraturan terkait sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang melakukan praktik tax avoidance, hal tersebut dilakukan agar perusahaan tidak melakukan praktik tax avoidance dan bagi penelitian selanjutnya dapat ditambahkan beberapa variabel lain seperti inventory intensity karena pada penelitian terdahulu inventory intensity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Inventory intensity menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan. Perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi akan memiliki biaya-biaya tambahan seperti biaya perawatan, dan biaya penyimpanan. Biaya tambahan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Maka dengan begitu perusahaan akan memanfaatkan persediaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan persediaan pada perusahaan serta dapat memperluas sampel pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 959–970. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital intensity Ratio Terhadap *Tax avoidance*. *Ultimaccounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i2.1883>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Fiska, R. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3, 490–512.
- Imanto, M. (2019). Radang telinga luar. *Jurnal Kesehatan*, VI(2), 201–210. <https://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/106/96>
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance , Profitabilitas, Likuiditas, Capital intensity, dan Inventory Intensity Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(11), 1–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4514/4516>
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital intensity dan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance* pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital intensity Terhadap *Tax avoidance*. “*LAWSUIT*” *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39.

<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>

- Mira, M., & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211–226. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4415>
- Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., & Mahardini, N. Y. (2022). The Impact of Leverage, Managerial Ownership, and Capital intensity on *Tax avoidance*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35–46. <https://doi.org/10.30656/jkk.v1i2.4490>
- Novilim, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 175–184. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.50>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital intensity, Dan Sales Growth Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Nur'aini dan Halimatusadiah. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Kepemilikan Manajerial , Proporsi Dewan Komisaris Independen , dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 686–692. <https://proceedings.unisba.ac.id/>
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pad Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efeke Indonesia Tahun 2014-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1.
- Plutzer, M. B. B. and E. (2021). *Pengaruh Gender, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. 6.
- Pratama, I. A., & Masripah. (2022). Penghindaran Pajak: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Koneksi Politik, Dan Kualitas Audit. *Accounting Student Research Journal*, 1(1), 134–153.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, Vol. 22(1), No. 1: 1-11.
- Rahayu, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Dewan Komisaris Independen. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dewan Komsiaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Tax avoidance*, 10(28).

- Rombbunga, M. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 2(3), 249–267. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i3.p249-267>
- Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Syaivina Ika Listiyadi. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas Corporate Social Responsibility, Strategi Bisnis, Dan Capital intensity Terhadap *Tax avoidance*. 2005–2003 ,8.5.2017 ,7א77.
- Widodo, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital intensity, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac.e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Wijaya, K. G. (2023). Pengaruh kualitas audit, praktik corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 455–464. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art52>

